



Rural-Proofing Gig Economy: Strategi Pemberdayaan Pemuda Grobogan untuk Peningkatan Pendapatan Mikro Berkelanjutan di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Galih Aripayugo^{1*}, Euis Eka Pramiasih²

¹PT Perkebunan Nusantara I, Indonesia

²Universitas Langlangbuana, Indonesia

galihariyugo25@gmail.com¹, euisseka@unla.ac.id²

*Penulis Korespondensi: galihariyugo25@gmail.com

Abstract. *This research aims to formulate an inclusive gig economy adaptation strategy (rural-proofing) for the youth in Grobogan Regency, focusing on increasing sustainable micro-income within the Tourism and Creative Economy sectors. Grobogan, which has the development vision of "Prosperous and Sustainable", faces a Welfare Paradox a low Open Unemployment Rate (3.23%) coupled with a significant Poverty Rate (11.43%). This condition suggests a dominance of low-productivity and low-income jobs (underemployment). Furthermore, the adoption of urban gig economy models (such as online transportation) has proven highly vulnerable to economic. Using a systematic literature review method and synthesis of local data, this study identifies three main gaps: the job quality gap (influenced by the low Average Years of Schooling at 7.29 years), the digital ecosystem gap (limited infrastructure and low digital literacy in rural areas), and the social protection gap (unclear legal status of gig workers). The main findings of this research highlight the necessity of shifting the focus from creating unskilled gig jobs (urban models) to a Rural-Proofing Strategy that includes: (1) Empowerment through experiential learning to foster young creative-preneurs and agro-preneurs, (2) Prioritizing infrastructure acceleration in Creative Economy centers, and (3) Local social protection innovation (e.g., subsidized BPJS Employment schemes) that can be integrated with existing local regulations. This strategy must be implemented through the Pentahelix approach, positioning the Government as the regulator and Academia as the training curriculum provider, supported by Business, Community, and Media. In conclusion, Grobogan's economic transition toward digitalization must be steered by adaptive and protective policies to ensure that digital innovation does not intensify income inequality.*

Keywords: *Gig Economy; Grobogan; Pentahelix; Rural-Proofing; Youth Empowerment*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi adaptasi ekonomi gig (*rural-proofing*) yang inklusif untuk generasi muda di Kabupaten Grobogan, dengan fokus pada peningkatan pendapatan mikro berkelanjutan di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Grobogan, yang memiliki visi pembangunan "Sejahtera dan Berkelanjutan", menghadapi Paradoks Kesejahteraan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang rendah (3,23%) namun disertai Angka Kemiskinan yang masih signifikan (11,43%). Kondisi ini mengindikasikan dominasi pekerjaan berproduktivitas dan berpendapatan rendah (*underemployment*). Di sisi lain, adopsi model *gig economy urban* (seperti transportasi online) terbukti sangat rentan terhadap guncangan ekonomi. Melalui metode *systematic literature review* dan sintesis data lokal, penelitian ini mengidentifikasi tiga kesenjangan utama: kesenjangan kualitas pekerjaan (dipengaruhi rendahnya Rata-rata Lama Sekolah 7,29 tahun), kesenjangan ekosistem digital (infrastruktur terbatas dan literasi rendah di pedesaan), dan kesenjangan perlindungan sosial (status hukum pekerja gig yang tidak jelas). Hasil utama penelitian ini adalah perlunya pergeseran fokus dari penciptaan *unskilled gig jobs* (model urban) ke Strategi *Rural-Proofing* yang mencakup: (1) Pemberdayaan berbasis *experiential learning* untuk menciptakan *creative-preneur* dan agro-preneur, (2) Prioritas akselerasi infrastruktur di sentra Ekonomi Kreatif, dan (3) Inovasi perlindungan sosial lokal (misalnya, skema subsidi BPJS Ketenagakerjaan) yang dapat diintegrasikan dengan regulasi daerah yang sudah ada. Strategi ini harus diimplementasikan melalui pendekatan Pentahelix, yang menempatkan peran Pemerintah sebagai regulator dan Akademisi sebagai penyedia kurikulum pelatihan, didukung oleh Bisnis, Komunitas, dan Media. Kesimpulannya, transisi ekonomi Grobogan menuju digitalisasi harus dikawal oleh kebijakan yang adaptif dan protektif untuk memastikan bahwa inovasi digital tidak justru mengintensifkan ketidaksetaraan pendapatan.

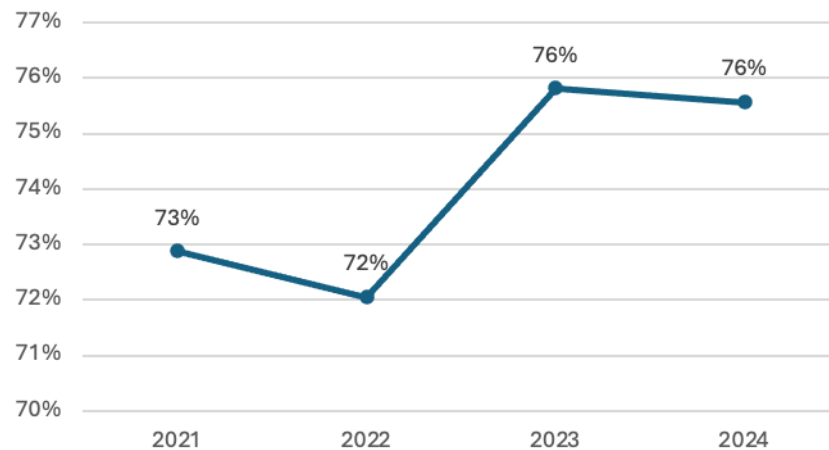
Kata kunci: Ekonomi Gig; Grobogan; Pemberdayaan Pemuda; Pentahelix; *Rural-Proofing*

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Grobogan saat ini diarahkan pada pencapaian visi strategis “Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan” sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan daerah (Pemkab Grobogan, 2025; Pemkab Grobogan, 2024). Visi ini berupaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui penguatan sektor unggulan berbasis potensi lokal, yakni sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. Ketiga sektor tersebut diposisikan sebagai pengungkit utama pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, sekaligus memperluas basis ekonomi produktif masyarakat. Fokus pada potensi lokal ini juga dimaksudkan untuk menciptakan struktur ekonomi daerah yang resilien terhadap tekanan eksternal dan mampu mendorong kemandirian ekonomi jangka panjang.

Analisis terhadap data strategis daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Grobogan menghadapi tantangan struktural dalam bentuk “Paradoks Kesejahteraan” (BPS Grobogan, n.d.). Meski Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tergolong tinggi, yakni sebesar 76,56%, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) relatif rendah di angka 3,23%, angka kemiskinan masih cukup tinggi dan stagnan pada kisaran 11,43%. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada akses terhadap lapangan kerja, melainkan pada kualitas dan produktivitas pekerjaan itu sendiri. Fenomena *underemployment* yakni dominasi pekerjaan informal, tidak stabil, dan berupah rendah masih menjadi karakteristik utama pasar tenaga kerja di Grobogan. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan mendasar dalam transformasi struktur ekonomi daerah menuju basis yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing.

Lebih jauh, kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Grobogan masih berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yakni sebesar 26,63% (BPS Grobogan, n.d.). Meskipun sektor ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, ketergantungan yang tinggi terhadap sektor primer menghadirkan kerentanan tersendiri, terutama terhadap fluktuasi iklim, harga komoditas, dan keterbatasan teknologi. Hal ini diperkuat oleh masih terbatasnya nilai tambah dari produk pertanian serta lemahnya integrasi rantai pasok, yang berdampak pada stagnasi pendapatan petani dan pelaku ekonomi desa. Oleh karena itu, strategi pembangunan ekonomi Grobogan ke depan harus mampu mengatasi dualitas antara tingginya partisipasi kerja dan rendahnya kesejahteraan, dengan menekankan transisi dari pekerjaan informal ke pekerjaan berbasis keterampilan dan teknologi khususnya dalam kerangka pembangunan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata yang berkelanjutan.



Gambar 1. Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 2021 - 2024

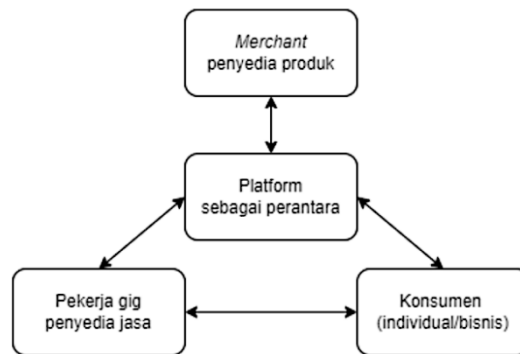
Sumber: BPS (2024)

Gig economy didefinisikan secara luas sebagai aktivitas ekonomi yang melibatkan pekerja paruh waktu atau *freelancer* untuk melakukan pekerjaan yang umumnya berada di sektor pelayanan (Merriam-Webster, 2024). Definisi lain menyebutnya sebagai pekerjaan jangka pendek dan berbasis tugas yang dimediasi oleh platform digital (Musytarineraca, 2021). Fenomena ini mencerminkan pasar tenaga kerja yang fleksibel, didasarkan pada permintaan, pekerjaan sesekali, dan pengaturan yang biasanya berbasis tugas (Schlagwein et al., 2020).

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh McKinsey (2016), pekerja independen dapat dikategorikan ke dalam empat segmen utama untuk tujuan analisis. Pertama, kelompok *free agents* yang secara sukarela memilih pekerjaan independen sebagai sumber pendapatan utama mereka. Kedua, kelompok *casual earners* yang menggunakan pekerjaan independen hanya sebagai sarana untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Ketiga, segmen *reluctants* yang menjadikan pekerjaan independen sebagai tumpuan penghasilan utama meskipun sebenarnya mereka lebih menginginkan pekerjaan tradisional. Terakhir, kategori *financially strapped* yang melakukan pekerjaan independen sebagai tambahan karena terpaksa oleh kondisi keuangan.

Terdapat sebuah pola hubungan segitiga yang menggambarkan interaksi antara aktor utama dalam aktivitas ekonomi gig. Dalam hal ini, platform digital berfungsi sebagai penghubung yang mempertemukan *merchant* (penjual atau penyedia produk), pekerja gig, dan konsumen, baik individu maupun bisnis, sehingga tercipta ekosistem yang saling terintegrasi dan saling menguntungkan. *Merchant* menggunakan platform gig untuk memasarkan produk atau layanan mereka kepada konsumen. Sementara itu, pekerja gig adalah individu atau pihak yang menawarkan keterampilan maupun jasa, seperti layanan antar barang atau layanan profesional lainnya, melalui platform tersebut. Bagi konsumen, platform gig menjadi sarana

untuk menemukan produk atau layanan sesuai kebutuhan dan preferensinya, yang kemudian disalurkan oleh pekerja gig melalui interaksi langsung maupun layanan jarak jauh.



Gambar 2. Pola Hubungan Triangular *Gig Economy*

Sumber: Izzati (2024)

Sebagian besar studi kasus *gig economy* di Indonesia terpusat pada sektor perkotaan (transportasi dan logistik) yang bersifat *unskilled* dan terbukti sangat rentan terhadap guncangan eksternal, sehingga berpotensi menciptakan "kemiskinan baru" (Setyawan & Permana, 2020; Christiayu & Putranto, 2022). Oleh karena itu, Grobogan, sebagai kabupaten yang didominasi oleh wilayah perdesaan dan sedang aktif mengembangkan sub-sektor unggulan seperti Kuliner, Kriya, dan Desain Produk (Bappeda Grobogan, 2024), membutuhkan strategi *Rural-Proofing Gig economy*. Strategi ini bertujuan mengadaptasi model gig agar resilien, inklusif, dan mampu meningkatkan nilai tambah di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menjadi fokus pembangunan daerah (Pemkab Grobogan, 2023).

Kesenjangan riset utama terletak pada kontras antara fokus literatur *gig economy* yang dominan urban-sentris, dengan tantangan struktural dan geografis spesifik di Grobogan. Tabel 1 menyajikan penelitian relevan yang menjadi landasan, diikuti dengan identifikasi kesenjangan riset.

Tabel 1. Tinjauan Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis (Tahun)	Fokus Studi dan Lokasi	Temuan Utama	Kesenjangan (Relevansi Grobogan)
Setyawan & Permana (2020)	Geografi Ekonomi Gig Indonesia (Urban-Rural)	<i>Gig economy</i> terpusat di perkotaan; rendahnya inovasi <i>gig</i> di pedesaan justru menjadi penyangga kemiskinan saat guncangan, tetapi juga menghambat kemajuan.	Grobogan perlu inovasi <i>gig</i> yang resilien (anti-guncangan), bukan sekadar replikasi model urban yang rapuh.
Permana et al. (2023)	Karakteristik Pekerja Gig Indonesia	<i>Gig economy</i> berpotensi menjadi sumber pendapatan tambahan, terutama melalui <i>skilled gig jobs</i> , dan menekankan pentingnya <i>experiential learning</i> .	Grobogan (RLS 7,29 tahun) membutuhkan intervensi spesifik untuk peningkatan keterampilan agar dapat mengakses <i>skilled gig jobs</i> (BPS Grobogan, n.d.).
Rochaeni (2023); ADB (2020)	Model Agri-Gig <i>economy</i> (Pedesaan)	Keberhasilan Agri-Gig bergantung pada literasi digital, akses internet, dan sistem pertanian terdigitalisasi. Menciptakan agro-preneur digital.	Grobogan (dominasi Pertanian 26,63%) harus mengadaptasi model ini, sambil mengatasi kendala infrastruktur dan literasi di pedesaan (BPS Grobogan, n.d.; Suwarni et al., 2019).
Qolbi et al. (2023); Kurniawan (2020)	Regulasi Perlindungan Pekerja Gig Indonesia	Status hukum pekerja <i>gig</i> di Indonesia masih belum jelas (dianggap mitra), yang menyebabkan hilangnya perlindungan sosial, upah, dan tunjangan.	Visi Grobogan Sejahtera menuntut adanya inovasi perlindungan sosial di tingkat lokal untuk pekerja <i>gig</i> muda (Pemkab Grobogan, 2025).
Suwarni et al. (2019); Manggarwetan (n.d.)	Digitalisasi UMKM Grobogan	Pelaku UMKM Grobogan kesulitan memanfaatkan e-commerce dan menampilkan produk karena kurangnya literasi digital dan terbatasnya infrastruktur internet/listrik di desa.	Grobogan harus mengatasi hambatan digital barrier untuk memberdayakan pemuda di sektor Ekonomi Kreatif dan Pariwisata (Pemkab Grobogan, 2023).

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Pertumbuhan sektor informal di Kabupaten Grobogan yang tidak diiringi oleh peningkatan kesejahteraan menunjukkan adanya tantangan struktural dalam kualitas pekerjaan, terutama di kalangan pemuda. Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Grobogan tergolong rendah, angka kemiskinan masih cukup tinggi, menandakan bahwa banyak pemuda yang bekerja namun dalam kondisi *underemployment* dengan pendapatan tidak layak. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat pendidikan yang tercermin dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,29 tahun (BPS Grobogan, n.d.). Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting: bagaimana mentransformasi tenaga kerja muda yang sebelumnya terserap di sektor informal tradisional menjadi pekerja lepas (*freelancer*) yang memiliki keahlian dan dapat mengakses pekerjaan berbasis proyek di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif?

Di sisi lain, tantangan dalam pengembangan ekosistem digital turut memperlebar kesenjangan antara potensi dan realisasi keterlibatan pemuda dalam ekonomi digital. Minimnya infrastruktur TIK dan rendahnya literasi digital di desa-desa membuat pemuda Grobogan hanya dapat mengakses pekerjaan gig ekonomi berupah rendah yang tidak membutuhkan keahlian tertentu, alih-alih menembus peluang *skilled gig economy* seperti desain grafis, pemasaran digital, atau produksi konten kreatif (Setyawan & Permana, 2020; Suwarni et al., 2019). Hal ini menunjukkan perlunya strategi khusus yang bersifat *Rural-Proofing*, yaitu pendekatan yang secara sadar menyesuaikan kebijakan ekonomi digital dengan kondisi perdesaan agar inklusif dan memberdayakan.

Selain itu, absennya sistem perlindungan sosial yang memadai bagi pekerja gig ekonomi di tingkat lokal menjadi tantangan tersendiri. Transisi pemuda dari pekerjaan konvensional ke model kerja fleksibel dan mandiri membawa risiko kerentanan pendapatan yang tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi kebijakan perlindungan sosial yang adaptif, misalnya subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan atau pembentukan skema jaminan berbasis komunitas yang terintegrasi dalam visi “Grobogan Sejahtera” (Pemkab Grobogan, 2025; Kurniawan, 2020). Dalam konteks ini, keterlibatan aktor lintas sektor melalui pendekatan Pentahelix menjadi sangat penting untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif desa yang berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh struktur ekonomi Grobogan terhadap formulasi strategi *gig economy*; (2) merumuskan strategi *Rural-Proofing* yang fokus pada peningkatan literasi digital dan keterampilan pemuda berbasis pengalaman; (3) mengembangkan rekomendasi kebijakan perlindungan sosial adaptif bagi pekerja gig ekonomi; dan (4) mengintegrasikan peran aktor Pentahelix dalam implementasi strategi tersebut. Secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai *gig economy* di wilayah perdesaan Indonesia yang masih terbatas. Sementara secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi berbasis bukti bagi Bappeda Grobogan untuk mendesain intervensi kebijakan yang konkret, aplikatif, dan terukur dalam kerangka perencanaan daerah berbasis ekonomi digital dan partisipatif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *literature review* yang didukung secara metodologis oleh *Systematic Literature Review* (SLR). Pendekatan ini dipilih untuk memastikan proses identifikasi, seleksi, dan sintesis literatur dilakukan secara sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tujuan utama dari penggunaan metode ini adalah untuk membangun kerangka konseptual dan menyintesis temuan empiris dari berbagai sumber relevan, baik berupa jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, maupun data statistik resmi. Strategi ini diharapkan menghasilkan rumusan kebijakan yang adaptif dan komprehensif dalam merespons tantangan *gig economy* di wilayah pedesaan seperti Kabupaten Grobogan (Roziqin et al., 2024).

SLR dalam penelitian ini mengacu pada kerangka kerja *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) yang telah dimodifikasi untuk konteks penelitian kebijakan daerah. Empat tahapan utama dilalui secara sistematis. Pertama, tahap identifikasi dilakukan dengan menentukan kata kunci utama, yakni "*Gig economy*", "Kesejahteraan", "Pedesaan", "Pariwisata", "Ekonomi Kreatif", dan "Grobogan". Kata kunci ini digunakan dalam pencarian literatur yang relevan, baik dari jurnal terindeks internasional maupun dokumen lokal. Kedua, tahap penyaringan melibatkan eliminasi sumber yang tidak sesuai, dengan hanya mempertahankan publikasi dalam rentang waktu 2014–2024 serta dokumen kebijakan daerah seperti RPJMD, RKPD, dan data statistik dari BPS Kabupaten Grobogan.

Pada tahap ketiga, yakni kesesuaian (*eligibility*), dilakukan seleksi lanjutan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Dokumen yang dipertahankan adalah yang secara eksplisit membahas isu-isu berikut: karakteristik *gig economy* di negara berkembang atau kawasan Asia Tenggara; kerentanan serta kebutuhan perlindungan sosial bagi pekerja fleksibel; model implementasi *gig economy* di sektor pertanian (*agri-gig*) dan ekonomi kreatif; serta data dan kebijakan pembangunan Kabupaten Grobogan. Sementara itu, sumber yang hanya menyoroti aspek teknologi murni tanpa kaitan dengan isu sosial-ekonomi, atau yang berfokus pada konteks geografis di luar Asia Tenggara, dieliminasi karena dianggap kurang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Tahap keempat adalah sintesis, di mana data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis secara terpadu. Misalnya, data indikator sosial ekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Kemiskinan, dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dari BPS Grobogan dikombinasikan dengan kerangka teoretis mengenai kerentanan *gig economy* (Setyawan & Permana, 2020; Kurniawan,

2020). Hasil sintesis ini menjadi dasar identifikasi tiga kesenjangan utama dalam literatur dan praktik: kesenjangan kualitas pekerjaan, kesenjangan ekosistem digital, dan kesenjangan perlindungan sosial. Ketiga kesenjangan ini kemudian dikembangkan sebagai basis argumen dalam perumusan strategi *rural-proofing* untuk penguatan *gig economy* lokal.

Subjek utama dalam kajian ini adalah literatur ilmiah, studi kasus relevan, serta data primer dan sekunder yang dikumpulkan dari sumber terpercaya. Literatur ilmiah mencakup jurnal terindeks Scopus dan Google Scholar, sedangkan data primer-sekunder meliputi laporan statistik resmi, dokumen kebijakan publik, serta analisis perencanaan dari Pemerintah Kabupaten Grobogan. Untuk memastikan keterlacakan dan keterhubungan data, instrumen analisis yang digunakan antara lain tabel sintesis indikator (misalnya, untuk menampilkan RLS atau Angka Kemiskinan) serta matriks perbandingan antara temuan akademik dan kondisi lokal aktual. Instrumen ini memungkinkan penulis melakukan pemetaan secara sistematis antara teori dan realitas kebijakan di tingkat daerah.

Proses pengumpulan data dilakukan secara daring melalui penelusuran pustaka akademik (Google Scholar, Scopus, dan Portal Garuda) serta pengunduhan dokumen perencanaan dan statistik dari situs resmi Pemkab dan BPS Grobogan. Teknik pengumpulan ini bersifat eksploratif namun selektif, dengan memperhatikan kualitas sumber, relevansi tematik, dan kelengkapan informasi. Selain itu, pendekatan triangulasi data juga digunakan untuk memverifikasi konsistensi antar sumber yang berbeda, terutama untuk isu-isu yang memiliki muatan data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan.

Untuk teknik analisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan *analisis deskriptif kualitatif*. Artinya, data statistik yang diperoleh seperti RLS 7,29 tahun atau Tingkat Kemiskinan 11,43% tidak hanya dijabarkan secara deskriptif, tetapi juga dianalisis dengan membandingkannya terhadap rekomendasi konseptual dalam literatur. Sebagai contoh, RLS yang rendah dikaitkan dengan kebutuhan pelatihan berbasis pengalaman (*experiential learning*) sebagai syarat partisipasi dalam *skilled gig jobs* (Permana et al., 2023). Melalui pendekatan ini, studi mampu merumuskan implikasi kebijakan yang tidak hanya berbasis data, tetapi juga relevan secara teoritis dan kontekstual, guna mengatasi tantangan pembangunan ekonomi digital di wilayah perdesaan.

Tabel 2. Literatur Utama yang Digunakan dalam Penelitian

Kategori Fokus	Sumber Utama	Jenis Dokumen	Relevansi/Kontribusi
Konteks Lokal Grobogan & Data Ekonomi	BPS Grobogan (n.d.); Pemkab Grobogan (2025); Suwarni et al. (2019)	Data Statistik & Peraturan Daerah	Memberikan data RLS, TPT, Kemiskinan, PDRB, dan tantangan literasi digital UMKM spesifik Grobogan.
Teori <i>Gig economy</i> & Kerentanan	Setyawan & Permana (2020); Kurniawan (2020); Qolbi et al. (2023)	Jurnal Internasional/Nasional	Memberikan kerangka kerentanan gig worker (urban-rural divide) dan urgensi perlindungan sosial.
Model Gig Sektoral (Pedesaan)	Rochaeni (2023); ADB (2020)	Jurnal Internasional/Nasional	Menyediakan model Agri-Gig dan Tourism Gig sebagai adaptasi yang dibutuhkan Grobogan.
Arah Kebijakan Lokal	Pemkab Grobogan (2023)	Peraturan Daerah	Menunjukkan adanya mandat Pemkab Grobogan untuk penugasan BUMD di bidang pembiayaan pertanian, yang dapat diadaptasi untuk perlindungan sosial.

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil sintesis terhadap data statistik Kabupaten Grobogan dan berbagai literatur ilmiah menunjukkan bahwa pengembangan *gig economy* di wilayah pedesaan tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa penyesuaian kontekstual. Kabupaten Grobogan, sebagai wilayah agraris yang sedang bergerak menuju transformasi digital, menghadapi tiga jenis kesenjangan utama yang memerlukan intervensi terarah: yaitu kesenjangan kualitas pekerjaan dan SDM, kesenjangan ekosistem digital, dan kesenjangan perlindungan sosial. Ketiga aspek ini menjadi landasan perlunya pendekatan *Rural-Proofing*, yaitu sebuah strategi adaptasi yang dirancang untuk memastikan bahwa model ekonomi perkotaan seperti *gig economy* tetap relevan dan berdampak positif ketika diterapkan di lingkungan pedesaan.

Kesenjangan pertama yang paling krusial adalah pada kualitas pekerjaan dan sumber daya manusia (SDM). Statistik resmi mencatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Grobogan relatif rendah, hanya 3,23 persen. Namun, kondisi ini tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang memadai karena angka kemiskinan masih tinggi, mencapai 11,43 persen (BPS Grobogan, n.d.). Ketimpangan ini menunjukkan bahwa banyak pemuda bekerja dalam sektor informal atau pekerjaan dengan pendapatan rendah yang tidak menjamin keberlanjutan hidup. Dengan kata lain, masalah utama bukan pada pengangguran, tetapi pada fenomena

underemployment, di mana pemuda terserap dalam pekerjaan yang tidak memaksimalkan potensi keterampilan dan produktivitas mereka.

Masalah ini semakin diperparah oleh rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Grobogan yang hanya mencapai 7,29 tahun. RLS ini jauh di bawah rata-rata nasional dan menjadi hambatan struktural utama dalam mengakses pekerjaan yang menuntut keahlian digital dan literasi teknologi tinggi. Menurut beberapa studi (Permana et al., 2023; Christiayu & Putranto, 2022), RLS yang rendah berbanding lurus dengan rendahnya akses pemuda terhadap *skilled gig jobs* seperti desain grafis, pemasaran digital, atau pengembangan konten. Padahal, sektor unggulan daerah seperti Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (meliputi kuliner, kriya, dan desain produk) sebenarnya sangat potensial untuk dikembangkan melalui platform digital, yang dalam praktiknya masih belum dioptimalkan secara maksimal oleh tenaga kerja lokal.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Grobogan telah mendorong pemanfaatan media digital untuk promosi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (Pemkab Grobogan, 2023), rendahnya tingkat pendidikan tetap menjadi *bottleneck* dalam penyediaan tenaga kerja lokal yang mampu bersaing dalam ekosistem ekonomi digital. Program promosi hanya efektif jika terdapat sumber daya manusia yang mampu mengelola, mengembangkan, dan memproduksi konten secara profesional. Tanpa intervensi yang fokus pada peningkatan kualitas SDM, upaya digitalisasi hanya akan dinikmati oleh segelintir pihak luar atau pihak swasta yang tidak mencerminkan keberdayaan lokal.

Kesenjangan kedua berkaitan dengan ekosistem digital atau *digital barrier*. Inisiatif digitalisasi sebenarnya telah dimulai oleh Pemerintah Daerah, seperti peluncuran platform digital untuk promosi UMKM dan pariwisata sejak 2021 (Pemkab Grobogan, 2021; 2023). Namun, kajian lapangan dan studi sebelumnya menunjukkan bahwa adopsi terhadap platform ini masih sangat terbatas. Banyak pelaku UMKM mengaku mengalami kesulitan dalam menggunakan *e-commerce*, baik karena keterbatasan literasi digital maupun karena kurangnya kepercayaan diri dalam menampilkan produk mereka secara daring (Suwarni et al., 2019). Fenomena ini menegaskan adanya kesenjangan antara kesiapan infrastruktur dan kesiapan pengguna.

Tantangan lain yang memperlebar kesenjangan ini adalah kondisi infrastruktur desa yang masih tertinggal. Banyak desa di Grobogan yang belum memiliki akses internet yang memadai, baik dari sisi kecepatan maupun kestabilan jaringan. Selain itu, masalah kelistrikan yang tidak konsisten juga menjadi hambatan utama dalam pemanfaatan teknologi secara optimal (Manggarwetan, n.d.; Panda, 2022). Dalam konteks *gig economy*, ketergantungan

terhadap internet dan perangkat digital adalah hal yang mendasar. Maka, tanpa penyediaan infrastruktur dasar yang memadai, mustahil bagi pemuda desa untuk bersaing secara setara dalam ekonomi digital nasional maupun global.

Secara nasional, dominasi *gig economy* masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, seperti Jabodetabek, Surabaya, atau Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi ekonomi digital belum menyentuh desa secara merata. Studi oleh Setyawan & Permana (2020) menegaskan bahwa keberhasilan *gig economy* sangat tergantung pada kesiapan ekosistem digital baik dari sisi perangkat, jaringan, maupun manusia yang mampu mengoperasikannya. Jika Grobogan ingin mendorong transformasi digital yang merata, maka pembangunan infrastruktur dan penguatan kapasitas SDM harus berjalan paralel dan simultan.

Kesenjangan ketiga adalah ketidakhadiran sistem perlindungan sosial yang mampu melindungi pekerja *gig economy*, terutama di level daerah. Di Indonesia, status pekerja *gig* masih bersifat abu-abu, sering kali dianggap sebagai mitra kerja atau kontraktor independen tanpa perlindungan hukum, jaminan upah, atau tunjangan (Kurniawan, 2020; Qolbi et al., 2023). Ketika *gig economy* didorong tanpa desain perlindungan sosial, risiko yang dihadapi justru dapat memperparah ketimpangan dan menciptakan kelompok pekerja miskin baru di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, intervensi perlindungan sosial adaptif di tingkat lokal menjadi sangat penting untuk menjamin keberlanjutan ekonomi *gig* yang inklusif dan adil.

Potensi solusi sebenarnya telah terbuka melalui kebijakan lokal. Pemerintah Kabupaten Grobogan, melalui peraturan daerah dan mandat kepada BUMD perbankan, telah membuka peluang untuk menciptakan skema perlindungan sosial mikro, terutama untuk pembiayaan usaha kecil dan tani (Pemkab Grobogan, 2023). Jika dirancang secara inovatif, skema ini dapat diperluas menjadi bentuk jaminan sosial khusus untuk pekerja *gig*, seperti subsidi premi BPJS atau tabungan pensiun mikro. Strategi ini tidak hanya akan mengurangi kerentanan pekerja, tetapi juga memberikan sinyal bahwa transformasi digital dan *gig economy* di pedesaan dapat berlangsung secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Pembahasan

Strategi *rural-proofing gig economy* di Kabupaten Grobogan perlu difokuskan pada transformasi struktural tenaga kerja muda, dari model pekerjaan yang tidak terampil dan rapuh (*unskilled/fragile*), yang selama ini berorientasi pada wilayah perkotaan, menuju model pekerjaan yang berakar kuat pada potensi lokal serta bersifat terampil dan tangguh (*skilled/resilient*). Dalam konteks ini, sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi landasan strategis yang paling relevan. Strategi ini bukan sekadar adaptasi dari model *urban-centric*, melainkan reposisi menyeluruh terhadap karakter ekonomi pedesaan dengan memperhitungkan

kekuatan lokal dan kebutuhan generasi muda (Setyawan & Permana, 2020). Untuk memastikan keberhasilan implementasi strategi ini, sinergi aktor dalam kerangka Pentahelix yakni Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, Komunitas, dan Media merupakan kunci yang tidak dapat dinegosiasikan (Bappeda Grobogan, 2024).

Peran Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai regulator, koordinator, dan fasilitator menjadi titik sentral dalam orkestrasi strategi *gig economy* inklusif. Melalui Bappeda serta dinas teknis seperti Disperindag, Disporabudpar, dan Dispermasdes, Pemkab dituntut untuk melakukan intervensi pada level kebijakan, penganggaran, dan infrastruktur. Prioritas kebijakan harus diarahkan pada perluasan konektivitas digital di desa, penguatan platform lokal, dan pembentukan kerangka hukum perlindungan sosial pekerja fleksibel. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam menyusun peta jalan (*roadmap*) jangka menengah hingga panjang dalam pengembangan ekonomi digital berbasis potensi lokal.

Sementara itu, institusi akademik dan *technopark* memiliki fungsi sentral sebagai pusat riset dan inovasi, sekaligus sebagai penyedia kurikulum pelatihan berbasis kebutuhan dunia kerja digital. Technopark Pangan Grobogan, misalnya, berpotensi menjadi episentrum inkubasi bisnis dan transfer teknologi, terutama dalam pengembangan *creative gig* dan *agri-gig*. Pelatihan tidak lagi cukup hanya berbasis teori, tetapi harus berorientasi pada *experiential learning*, dengan pendekatan yang kontekstual terhadap produk lokal, platform digital, dan tantangan infrastruktur yang dihadapi komunitas setempat (Permana et al., 2023).

Dari sisi dunia usaha, pelibatan sektor privat, UMKM, dan BUMD tidak hanya sebagai pengguna jasa tenaga kerja digital, tetapi juga sebagai investor dalam pengembangan platform lokal dan mitra dalam perlindungan sosial. BUMD, khususnya perbankan daerah, perlu mengembangkan skema pembiayaan mikro dan perlindungan sosial untuk *freelancer* lokal, dengan menjangkau pelaku *gig* yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam hal ini tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat keberlanjutan dan resistensi ekonomi lokal terhadap krisis.

Komunitas lokal dan organisasi pemuda memainkan peran kunci dalam proses adopsi teknologi dan penguatan basis sosial program *gig economy*. Mereka tidak hanya sebagai penerima manfaat pelatihan, tetapi juga sebagai mitra utama dalam diseminasi informasi, pelaksanaan pelatihan literasi digital, dan pengembangan konten lokal. Misalnya, Komunitas Wisata Grobogan telah menjadi contoh bagaimana kekuatan komunitas dapat dimobilisasi untuk mendukung promosi wisata dan produk ekonomi kreatif melalui media sosial (Suwarni

et al., 2019). Peran komunitas ini penting dalam menjembatani kesenjangan digital antar generasi.

Media dan organisasi masyarakat sipil berfungsi sebagai kanal informasi dan pengawasan publik. Peran mereka sangat strategis dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program *gig economy*, khususnya dalam penyebaran peluang pelatihan, pendampingan, serta informasi pasar kerja digital. Selain itu, media lokal dan *content creator* dapat menjadi katalisator perubahan dengan memproduksi narasi-narasi positif tentang ekonomi kreatif lokal, serta mendorong adopsi model kerja digital yang sesuai dengan kondisi Grobogan. Dalam konteks ini, sinergi Pentahelix bukan hanya kolaborasi administratif, melainkan kemitraan strategis lintas sektor yang berorientasi pada hasil jangka panjang.

Alih-alih mereplikasi model *gig economy* berbasis transportasi yang rentan dan cenderung eksploitatif (Setyawan & Permana, 2020), Grobogan harus membangun transisi sektoral menuju model *Tourism Gig* dan *Creative Gig*. Model *Creative Gig* dapat menciptakan peluang kerja bagi pemuda sebagai *digital marketer*, desainer grafis, atau *content creator* yang mempromosikan produk kriya, kuliner, dan wisata lokal melalui platform digital. Ini membuka peluang penciptaan nilai tambah digital di sektor-sektor unggulan (Ardiani, 2024). Adapun *Tourism Gig* mencakup peran pemuda sebagai pemandu wisata daring, pengelola akun destinasi, dan pencipta konten promosi berbasis media sosial.

Salah satu tantangan terbesar Grobogan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang masih rendah (7,29 tahun). Oleh karena itu, strategi peningkatan kapasitas SDM tidak dapat sepenuhnya mengandalkan pendidikan formal. Sebaliknya, fokus harus digeser ke pelatihan vokasional berbasis keterampilan digital dan *experiential learning*. Pemkab Grobogan dapat mendirikan *Creative Economy Academy* yang menyasar keterampilan seperti fotografi digital, desain produk, manajemen media sosial, hingga penguasaan SEO dan *e-commerce*. Model pelatihan ini harus berbasis proyek nyata, di mana peserta langsung terlibat dalam proses produksi dan pemasaran produk digital (ADB, 2020).

Pembangunan infrastruktur digital juga menjadi komponen esensial dalam strategi *Rural-Proofing*. Tanpa akses internet yang stabil dan listrik yang memadai, semua program pelatihan dan digitalisasi akan sulit terealisasi. Oleh karena itu, Bappeda Grobogan perlu menetapkan desa-desa prioritas sebagai *pilot project* untuk percepatan konektivitas digital. Sinergi antara pemerintah daerah, Technopark, dan sektor swasta dalam membentuk pusat inovasi dan inkubasi bisnis berbasis digital di desa akan membantu memutus rantai distribusi konvensional yang panjang dan mengurangi biaya logistik UMKM (Manggarwetan, n.d.; Panda, 2022).

Akhirnya, untuk memastikan keberlanjutan transisi ke ekonomi digital, perlindungan sosial bagi pekerja gig menjadi sangat mendesak. Pemkab Grobogan dapat mengembangkan Perlindungan Sosial Mikro Daerah, berupa subsidi BPJS Ketenagakerjaan (JKK dan JKM) dan skema pembiayaan mikro berbasis regulasi lokal. Mandat kepada BUMD dalam pembiayaan usaha tani dapat diperluas untuk menyentuh pekerja *freelance* digital di sektor kreatif dan pariwisata. Dengan dukungan regulasi dan intervensi fiskal yang tepat, transisi menuju *gig economy* berbasis potensi lokal di Grobogan tidak hanya akan meningkatkan pendapatan mikro, tetapi juga mendorong lahirnya ekosistem ekonomi digital yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai visi Grobogan yang "Sejahtera dan Berkelanjutan," adopsi *gig economy* harus di-*rural-proof* secara strategis, tidak hanya mengejar pertumbuhan kuantitas pekerjaan, melainkan kualitas pendapatan. Paradoks Kesejahteraan Grobogan (TPT rendah, Kemiskinan tinggi, RLS rendah) mengonfirmasi bahwa intervensi harus difokuskan pada tiga pilar utama: (1) Transformasi Kualitas Pekerjaan melalui *skilled gig jobs* di sektor Ekonomi Kreatif dan Pariwisata; (2) Penghapusan Digital Barrier melalui akselerasi infrastruktur dan literasi digital berbasis pengalaman; dan (3) Penciptaan Jaring Pengaman Sosial yang inovatif di tingkat lokal. Implementasi strategi *Rural-Proofing* ini akan memastikan bahwa inovasi digital yang masuk ke Grobogan berfungsi sebagai katalisator pemerataan kesejahteraan, bukan sebaliknya (Setyawan & Permana, 2020).

Berikut adalah rekomendasi kebijakan yang terperinci bagi Bappeda Kabupaten Grobogan untuk mengintegrasikan strategi *Rural-Proofing gig economy* ke dalam kerangka perencanaan daerah (RPJMD/RKPD). Untuk jangka pendek (6–12 bulan), fokus kebijakan kualitas pekerjaan dan SDM dapat dimulai dengan meluncurkan "Grobogan *Creative Academy*" yang menyediakan pelatihan *experiential learning* seperti fotografi, *content creation*, dan digital marketing untuk pemuda di sentra kriya/kuliner (Permana et al., 2023; Bappeda Grobogan, 2024). Selain itu, prioritas anggaran RKPD juga sebaiknya diberikan untuk peningkatan stabilitas internet dan listrik di 5-10 desa sentra pariwisata (Manggarwetan, n.d.; Panda, 2022). Dalam hal perlindungan sosial, langkah pertama adalah melakukan studi kelayakan dan merumuskan Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai skema subsidi iuran JKK/JKM BPJS Ketenagakerjaan bagi pemuda *gig worker* Grobogan (Kurniawan, 2020).

Untuk jangka menengah (1–3 tahun), integrasi model *Agri-Gig*, seperti digital marketing hasil tani, dapat menjadi kurikulum wajib di Technopark Pangan Grobogan (ADB,

2020; Technopark Pangan Grobogan, n.d.). Pengembangan dan promosi platform digital lokal yang fokus pada B2B (penghubung *freelancer* lokal dengan UMKM) akan membantu memotong rantai pasok. Selain itu, BUMD perbankan Grobogan dapat diberikan tugas untuk membentuk unit khusus yang melayani pembiayaan mikro dan perlindungan sosial bagi pekerja gig informal, memanfaatkan payung regulasi Pemda yang sudah ada (Pemkab Grobogan, 2023).

Untuk jangka panjang (3–5 tahun), salah satu langkah penting adalah menetapkan *key performance indicator* (KPI) di RPJMD yang mengukur peningkatan pendapatan *gig worker* di sektor kreatif, bukan hanya jumlah pekerja. Kolaborasi jangka panjang dengan Dispermasdes juga diperlukan untuk memastikan program infrastruktur digital menjangkau seluruh kawasan perdesaan secara merata. Terakhir, advokasi kebijakan di tingkat nasional perlu didorong untuk pengakuan status *hybrid* pekerja *gig*, guna menjamin perlindungan upah dan hak ketenagakerjaan yang lebih kuat (Qolbi et al., 2023).

DAFTAR REFERENSI

- Ardiani, D. (2024). Tipologi umum ekonomi gig. *Journal of Regional Economics and Development*, 1(3).
- Asian Development Bank. (2020). How gig economy can transform farms in the developing world. *Asian Development Bank Blog*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan. (n.d.). Data strategis Grobogan. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan*.
- Bappeda Grobogan. (2024). FGD pengembangan ekonomi kreatif dengan tema pengisian borang KaTa Kreatif 2024. Grobogan: Bappeda Kabupaten Grobogan.
- Christiayu, N., & Putranto, F. X. G. (2022). Kerentanan kesejahteraan gig worker di Indonesia pascapandemi. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 12(2). <https://doi.org/10.52813/jei.v12i2.479>
- Disperindag Grobogan. (2021). Kebijakan sektor perdagangan dan perindustrian Grobogan. Grobogan: Disperindag Kabupaten Grobogan.
- Izzati, S. R., et al. (2024). Studi literatur: Analisis pengaruh ragam karakteristik pekerja ekonomi gig terhadap perekonomian nasional. *Journal of Regional Economics and Development*, 1(3), 1-20. <https://doi.org/10.47134/jred.v1i3.337>
- Kurniawan, R. (2020). Minimnya perlindungan sosial: Salah satu permasalahan utama dalam gig economy. Dalam *Perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja gig*.
- Manggarwetan Grobogan. (n.d.). E-commerce solusi digital untuk pertumbuhan UMKM di pedesaan. Manggarwetan: Desa Manggarwetan Grobogan.
- Nugroho, A. (2021). Ekonomi gig: Peluang dan tantangan di era kerja fleksibel.
- Panda. (2022). Keterbatasan infrastruktur teknologi dan internet di desa. Panda: Rural Innovation.

- Pemkab Grobogan. (2021). Disperindag luncurkan platform digital Gebyar Pasar Rakyat Grobogan Virtual. Grobogan: Pemkab Grobogan.
- Pemkab Grobogan. (2023). Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2023 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.
- Pemkab Grobogan. (2023). Sekda Grobogan ajak pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif optimalkan media digital. Grobogan: Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan.
- Pemkab Grobogan. (2024). Ranwal RPJMD 2025–2029 disepakati, Grobogan mantapkan arah pembangunan lima tahun ke depan. Grobogan: Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan.
- Pemkab Grobogan. (2025). Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2025 tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025.
- Permana, A., et al. (2023). Peluang gig economy untuk pendapatan tambahan kelas menengah di Jakarta. Jakarta: Jurnal Ekonomi Ketenagakerjaan.
- Qolbi, H. F., Azhari, A. F., & Rizka. (2023). Perbandingan kedudukan hukum pekerja gig economy di Indonesia, Belanda, dan Inggris. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2).
- Rochaeni, S. (2023). Is it possible to apply gig economy for farmers in Indonesia? *International Journal of Economics and Financial Modeling*, 6(1).
- Roziqin, A., Romadhan, A. A., & Suhermanto, D. F. (2024). Memahami ekonomi gig global: Analisis & pemetaan riset ekonomi gig ke depan. *Kemitraan semu dalam ekonomi gig di Indonesia*.
- Setyawan, D., & Permana, A. (2020). When the pandemic struck, Indonesia's urban gig workers were hit the hardest. *LSE Business Review Blog*.
- Suwarni, Y., et al. (2019). Pengaruh ekonomi digital terhadap pendapatan UMKM di Kabupaten Grobogan dengan literasi digital sebagai variabel moderasi. Yogyakarta: UMBIMA.
- Technopark Pangan Grobogan. (n.d.). Technopark Pangan Grobogan. Grobogan Smart City.